

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN TANAH KAMPUS UNDIKSHA JINENGDALEM (STUDI PUTUSAN NO.51/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)

Oleh :

Jose Widyatama, NIM. 1814101051
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk delik korupsi dalam pengadaan tanah di instansi pemerintahan, dan untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pada perkara korupsi pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh rangkaian bentuk delik yang digunakan oleh pelaku korupsi proyek pengadaan tanah, yaitu antara lain memperdagangkan pengaruh, menyalahgunakan kewenangan, penyuapan, memecah objek pengadaan, memborong tanah di lokasi sekitar proyek pengadaan tanah, pengelembungan harga dan memalsukan dokumen. Adapun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diterapkan pada dakwaan subsider kepada I Wayan Suarsa dan dipilih oleh hakim sebagai pasal yang tepat untuk dijatuhkan didasari oleh jabatan I Wayan Suarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Undiksha Jinengdalem yang tidak mengindahkan prosedur pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 3.790.875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Kata kunci: Delik, Menyalahgunakan Kewenangan, Instansi Pemerintah, Korupsi, Pengadaan Tanah.

**JUDICAL OBSERVATION OF *KAMPUS UNDIKSHA
JINENGDALEM* LAND PROCUREMENT CORRUPTION
OFFENCE (DECREE STUDY NUMBER 51/PID.SUS-
TPK/2015/PN.DPS)"**

By :

Jose Widyatama, Student ID Number : 1814101051

Law Department

ABSTRACT

This research serves the purpose of analyzing the forms of corruption offence in government land procurement and acknowledging the implementation of third chapter act num. 31, 1999 regarding acts of corruption in Kampus Undiksha Jinengdalem land procurement, according to Denpasar Public Court Decree num. 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS. The type of research conducted in this paper is normative law research by using the statute and case approach. The law materials are including primary, secondary and tertiary. Data acquirement technique which is carried out in this research is through document study which then analyzed in juridical qualitative analysis. The result of this research shows that there are seven types of modus operandi carried out by land procurement corruption offenders, inter alia, trading in influence, abusing authority, bribery, breaking procurement object buying lands around the procurement, marking up prices and falsifying documents. Subsidiary charge indicted to I Wayan Suarsa, according to third chapter act num. 31, 1999, was made proper by the judge as follows the chapter to charge him, based on his position as the Chief of Undiksha Jinengdalem Land Procurement. The act of disobeying procurement procedures which causes a total state finance loss of Rp. 3.790.875.454,00 (Three billion seven hundred ninety million eight hundred seventy five four hundred and fifty four rupiah).

Keyword: Delic, Abuse of Authority, Government Agencies, Corruption, Land Procurement.